

Sekilas:

Program SKALA di Nusa Tenggara Timur

September 2024

Pengantar

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) didirikan pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang No. 64/1958. Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan lebih dari 3.000 desa, dengan Kupang sebagai ibu kota provinsi. Provinsi ini mencakup tiga pulau besar –Flores, Timor, dan Sumba– yang dikelilingi oleh lebih dari 600 pulau kecil. NTT dikenal akan kekayaan budaya dan keindahan alamnya, yang mendukung sektor pariwisata. Namun, kondisi geografis yang sulit, iklim semi-kering, dan risiko bencana dapat menghambat akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Musim kemarau yang panjang dan dampak perubahan iklim memperburuk kelangkaan air dan menjadi tantangan pengembangan pertanian.

Pemerintah NTT telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi tantangan pembangunan dengan melakukan reformasi fiskal, kebijakan, dan perencanaan yang mendorong partisipasi masyarakat. Fokus

utamanya adalah pengelolaan keuangan yang efisien untuk pemenuhan layanan dasar yang inklusif bagi semua warga. Pemerintah juga memprioritaskan kesetaraan gender, hak disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam dokumen kebijakan utama. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah dilakukan untuk memperkuat pengelolaan keuangan publik, meningkatkan pemanfaatan data untuk perencanaan, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Program SKALA¹ bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, memperkuat pemanfaatan data dan analisis yang handal, meningkatkan kapasitas keuangan daerah, dan memperkuat kualitas belanja publik. Kantor SKALA di NTT mulai beroperasi pada Mei 2023, menandai kemajuan signifikan dalam kolaborasi dan pengembangan daerah.

Gambar 1. Data Administratif Utama



Jumlah Penduduk:
5,65 juta jiwa
(Badan Pusat Statistik, 2024)



Jumlah Pegawai
Negeri Sipil:
117.429



Luas Wilayah:
46.446,64 km²
(Badan Pusat Statistik, 2023)



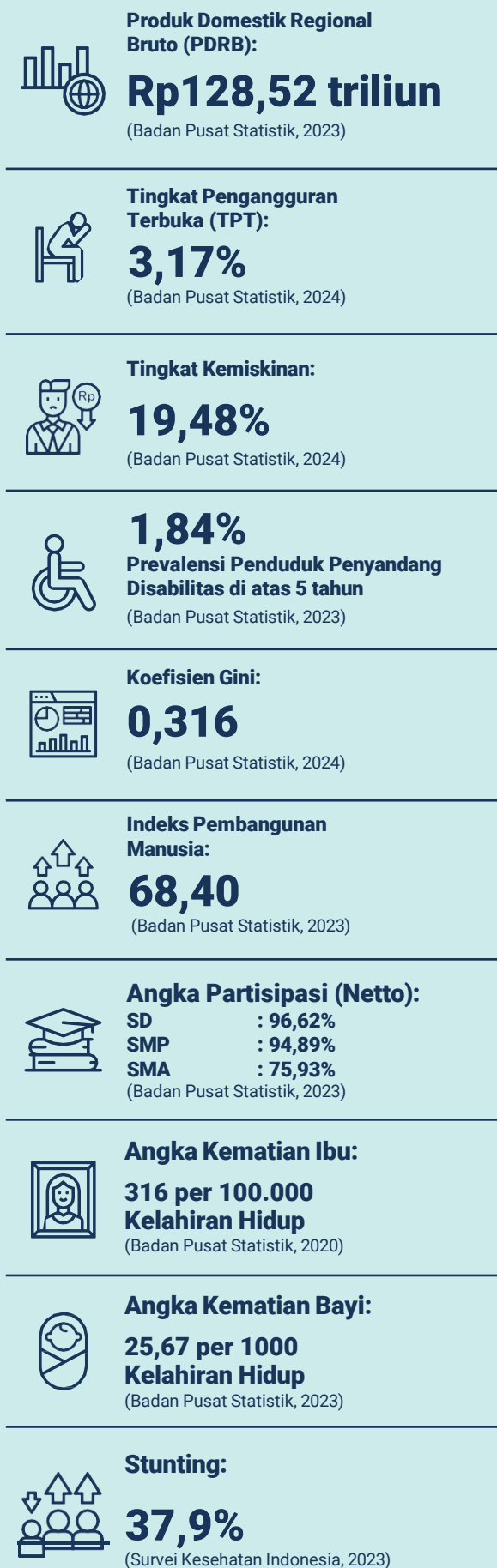
Pusat Pemerintahan
dan Ibu Kota:
Kota Kupang



Kapasitas Keuangan Daerah:
Rp4,4 triliun
(2022), dengan
50-70% berasal dari
Transfer Keuangan
Daerah
(Badan Pusat Statistik, 2023)

1. Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Gambar 2. Data Sosioekonomi Utama



Pembangunan Ekonomi dan Sosial

NTT telah mencapai kemajuan signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Provinsi ini berhasil memanfaatkan sumber daya alam untuk sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan produk domestik bruto sebesar Rp 128,52 triliun pada tahun 2023. Sektor pertanian dan pariwisata memiliki potensi besar untuk mendukung kemakmuran jangka panjang.

Pemerintah provinsi berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Investasi dalam infrastruktur, seperti peningkatan jaringan jalan dan perluasan jangkauan listrik, bertujuan untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi di bidang pariwisata dan pertanian.

Dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan inklusif, pemerintah provinsi berupaya memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTT serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di masa depan.



Dukungan SKALA untuk peningkatan Pelayanan Dasar Inklusif di NTT

Penyediaan layanan publik merupakan salah satu tugas utama pemerintah daerah. Program SKALA memberikan dukungan untuk peningkatan penyediaan layanan dasar yang lebih efektif di daerah. Pemerintah provinsi berperan penting dalam memastikan pembentukan dan operasionalisasi tata kelola Program SKALA di NTT. Melalui pembentukan Komite Program Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, diharapkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dapat dilakukan dengan lebih baik. SKALA juga menyelaraskan Rencana Kerja Tahunannya dengan prioritas pemerintah daerah yang tercermin pada dokumen dan inisiatif perencanaan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan dukungan SKALA benar-benar sejalan dan memperkuat perwujudan prioritas pemerintah. SKALA juga mendorong pendekatan kolaborasi pemerintahan (*collaborative governance*) yang didorong melalui pemahaman bersama, kolaborasi antar mitra pemerintah, serta sinergi yang berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola daerah



Mempromosikan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Pemerintah NTT telah membuat kemajuan substansial dalam upaya mendorong kebijakan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, yang dapat dijadikan praktik baik bagi daerah lain. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi NTT membentuk tim untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD), yang selesai pada tahun 2023 dan akan diimplementasikan pada 2024-2026. SKALA berperan penting dalam memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah provinsi dan perwakilan penyandang disabilitas di berbagai tingkat. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)² memastikan RAD PD disusun sesuai kebutuhan penyandang disabilitas dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (2025-2045).

Pemerintah Provinsi NTT juga memperkuat inisiatif Pengarusutamaan Gender (PUG), yang membuahkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama pada tahun 2023. SKALA mendukung upaya ini melalui bimbingan teknis dalam *Analisis Gender Pathway*, *Gender Action Budgeting*, dan revitalisasi kelompok kerja PUG di provinsi. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT telah mengembangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelanjutan untuk memberdayakan lansia dan menyediakan layanan dasar serta perlindungan sosial bagi mereka. Upaya ini mencerminkan komitmen Pemerintah NTT untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.



Memanfaatkan Data dan Analitik untuk Perencanaan dan Penyediaan Layanan yang Lebih Baik

Sejalan dengan kebijakan Satu Data Nasional, Pemerintah NTT berupaya meningkatkan kualitas data untuk perencanaan pembangunan melalui revitalisasi Forum Satu Data NTT. BAPPERIDA dan Dinas Komunikasi dan Informatika telah berkolaborasi untuk menyusun SOP Petunjuk Teknis Satu Data NTT dan Rencana Aksi Satu Data, yang akan dilampirkan dalam revisi Peraturan Gubernur No. 64/2020 untuk menyelaraskan dengan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN).

Pemerintah NTT juga mendorong pemanfaatan data di tingkat desa. Di Sumba Barat Daya, operator desa dilatih untuk menggunakan SEPAKAT Edu, sebuah platform pembelajaran digital, dengan

2. OMS utama yang terlibat antara lain GARAMIN, FORMASI Disabilitas, PERTUNI, FORSADIKA, KDD, PERMATA, PERSANI, TABOR, dan KIPDA.

lima kabupaten lainnya meminta dukungan serupa untuk memperkuat SEPAKAT Desa pada tahun 2024. Bersama SKALA, Pemerintah NTT mengintegrasikan berbagai dataset seperti DTKS, P3KE, data dari OPD, dan REGSOSEK³ untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. Data terintegrasi ini memastikan ketersediaan informasi yang akurat untuk perencanaan dan penganggaran di Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, dan Sumba Barat Daya, serta mendukung program pencegahan stunting yang didanai oleh Dana Insentif Daerah. Para pelatih utama REGSOSEK di NTT juga aktif membantu kabupaten dan kota dalam menggunakan data REGSOSEK dalam perencanaan, penganggaran, dan berbagai dokumen rencana aksi untuk kelompok rentan, termasuk lansia dan disabilitas. Upaya ini mencerminkan komitmen NTT dalam menyediakan data yang akurat dan mendukung kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



Meningkatkan Kapasitas Fiskal

Pemerintah NTT telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1/2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang disesuaikan dengan UU HKPD 1/2022. Untuk memperkuat implementasinya, Pemerintah NTT juga menerbitkan Peraturan Gubernur No. 8 tentang Retribusi Daerah dan No. 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan tata cara pemungutan retribusi dan pajak, serta memfasilitasi kesepakatan dengan 22 kabupaten/kota mengenai penerapan opsi pemungutan pajak daerah. Mulai tahun 2025, Pemerintah NTT akan memperkenalkan objek pajak baru yang mencakup pajak alat berat dan mineral. Selain itu, retribusi juga diperkuat diantaranya retribusi parkir di ruas jalan provinsi, serta retribusi dari penjualan produk usaha daerah seperti ternak, pupuk organik, bibit, hasil tenun, konveksi dan makanan khas lokal.

Selanjutnya, dalam upaya mendukung peningkatan kapasitas fiskal, sebagai hasil dari perbaikan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah NTT telah memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant sebesar 21% untuk periode 2023-2024, dibanding tahun sebelumnya sebesar IDR 1,37 triliun. Dengan ruang fiskal yang lebih besar ini, NTT dapat lebih baik membiayai layanan dan program esensial. Selain itu, SKALA turut mendukung pengelolaan transfer fiskal di NTT dengan memastikan *tagging* program kegiatan khusus melalui DAU grant untuk pembiayaan SPM, serta memastikan alokasi untuk penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan daerah.

3. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), OPD (Organisasi Perangkat Daerah), REGSOSEK (Registrasi Sosial Ekonomi).



Meningkatkan Kualitas Belanja: Perencanaan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen meningkatkan pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah (Renaksi) SPM 2023-2027, yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 41/2024 dan Keputusan Sekretariat Penyelenggaraan SPM No. 161. Dokumen ini berisi pedoman untuk mencapai target SPM. Pemerintah mendukung pengembangan Renaksi SPM di tingkat provinsi dan kabupaten, dengan memperkuat koordinasi melalui Biro Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pelaporan. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri bertujuan membangun kapasitas OPD dalam empat tahap pelaksanaan SPM, yang telah meningkatkan Indikator Pencapaian SPM menjadi 81,48% dan berkontribusi pada peningkatan DAU Block Grant untuk tahun 2024.

SKALA mendukung peningkatan kapasitas tim SPM NTT dalam pelaporan tepat waktu dan memperbaiki kinerja Tim Penerapan SPM. Rencana Aksi SPM dan GEDSI, serta data REGSOSEK, telah dimasukkan dalam RPJPD 2025-2045 dan RPJMD Teknokratis, memastikan keselarasan tujuan pembangunan dan penganggaran yang efektif. NTT juga telah menyelaraskan rencana dari 22 kabupaten/kota dengan pedoman provinsi dan pusat, serta mengintegrasikan SPM dalam penganggaran. Alat pemantauan yang dikembangkan mencakup unsur GEDSI untuk mengumpulkan data terpilah berdasarkan gender dan disabilitas.

Rencana Kerja SKALA 2024-2025 :

TEMA	AREA FOKUS RENCANA KERJA 2024-2025
Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI)	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung kolaborasi antara JMS dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif, yang menasar pada kebutuhan kelompok rentan melalui Musrenbang Inklusif di tingkat Provinsi.• Mendukung peningkatan kapasitas JMS tentang pemanfaatan data, isu-isu GEDSI, serta SPM, agar mereka dapat lebih aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan mengadvokasi isu-isu yang dihadapi kelompok rentan.• Mendukung Pemerintah Provinsi NTT dalam mengembangkan model kolaborasi partisipatif dengan JMS, guna mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif.
Memperkuat Data dan Analisis (D&A)	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung pemerintah provinsi dalam memperkuat Satu Data Indonesia dari aspek kelembagaan dan tata kelola melalui regulasi yang mendorong penguatan Satu Data Daerah.• Mendorong pengembangan Portal Satu Data NTT serta meningkatkan kapasitas Pemerintah Provinsi dalam memanfaatkan portal tersebut.• Mendukung pemerintah provinsi dalam melakukan Padu Padan Data untuk memperkuat program perlindungan sosial di Provinsi NTT• Mendorong penggunaan data REGSOSEK dalam perencanaan dan penganggaran di provinsi dan kabupaten dengan meningkatkan kapasitas pelatih serta mendukung proses permintaan Hak Akses untuk Kabupaten/Kota.• Memperkuat dan memperluas sistem informasi di tingkat desa dengan SEPAKAT Desa, meningkatkan kapasitas pengelola data di tingkat kabupaten dan desa, serta memperkuat kolaborasi dengan universitas melalui KKN Tematik.
Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung pengembangan regulasi dan kebijakan terkait pajak serta retribusi daerah (PDRD).• Mendukung penyusunan rencana bisnis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memastikan implementasinya.• Mendukung pemerintah dalam menyusun penganggaran yang inklusif melalui regulasi pendukung (STRADA, PUG) dan peningkatan kapasitas di tingkat provinsi serta kabupaten.
Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah (SPM)	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung penerapan fungsi korbinwas provinsi untuk meningkatkan Indeks Pencapaian SPM provinsi dan kabupaten/kota melalui peningkatan kapasitas dalam 4 tahapan penerapan SPM.• Berkolaborasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi untuk membantu kabupaten/kota dalam menyusun regulasi dan rencana aksi SPM, serta menetapkan Tim Penerapan SPM di tingkat kabupaten/kota.• Memfasilitasi integrasi Rencana Aksi SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah
Tata Kelola Program (PPC)	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan Tata Kelola Program SKALA di Provinsi NTT